

P-55

**MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT ADAT
SEBAGAI STRATEGI DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
EKONOMI NASIONAL
(STUDI KASUS ADAT BETAWI DKI JAKARTA)**

**MODEL OF ECONOMIC EMPOWERMENT OF INDIGENOUS PEOPLES
AS A STRATEGY IN ACCELERATING NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT
(CASE STUDY OF BETAWI CUSTOM, IN DKI JAKARTA)**

Dr. I Wayan Ruspendi Junaedi^{1*}, Dr. I Wayan Damayana², Dr. Dermawan Waruwu³
^{1,2,3} Universitas Dhyana Pura, Jl. Raya Padang Luwih Tegal Jaya, Dalung, Kuta, Badung

*E-mail: ruspendijunaedi@undhiraBali.ac.id

Diterima 01-10-2020	Diperbaiki 11-10-2020	Disetujui 25-10-2020
---------------------	-----------------------	----------------------

ABSTRAK

DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia yang sistem perekonomiannya sudah terbuka seluruh komponen perekonomiannya berada di Jakarta. Namun pada praktiknya Jakarta masih memiliki sistem adat yaitu adat Betawi. Kehadiran lembaga perekonomian berlandaskan kebudayaan Betawi mengangkat perekonomian masyarakat di Jakarta khususnya masyarakat ekonomi menengah kebawah. Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu, Bagaimana cara masyarakat Adat Betawi membangun sistem perekonomian masyarakatnya. Bagaimana bentuk lembaga ekonomi masyarakat adat di DKI Jakarta dalam menjalankan roda perekonomian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara masyarakat adat membangun sistem perekonomiannya; untuk mengidentifikasi bentuk lembaga ekonomi masyarakat adat di Indonesia. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif (mix method) dengan tipe penelitian case study. Data dikumpulkan dan dianalisis secara observation, wawancara, dan dokumen. Hasil dan temuan penelitian ini cara masyarakat Adat Betawi membangun sistem perekonomian masyarakatnya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat adat yang didasarkan pada konsep bahwa setiap warga masyarakat memiliki kewajiban untuk mendukung kegiatan adatnya masing-masing. Bentuk lembaga ekonomi masyarakat Adat Betawi di DKI Jakarta yang berhasil adalah koperasi jasa “Jakarta Tentram Sejahtera (JTS)”. Lembaga adat atau jenis usaha yang ada pada Koperasi JTS bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan modal dalam mengembangkan usahanya masing-masing maupun dalam menjual hasil usahanya tersebut. JTS merupakan salah satu model yang bisa digunakan sebagai percepatan pembangunan ekonomi nasional. Dengan adanya Koperasi Jasa JTS ini maka masyarakat adat Betawi mengalami peningkatan ekonomi dan kesejahteraan hidupnya.

Kata kunci: *Adat Betawi, Ekonomi Berbasis Adat, Ekonomi Nasional, Koperasi Jasa JTS.*

ABSTRACT

Indigenous based on economic institutions aim to maintain the local wisdom of the community as well as accelerate national economic development. People's economic lives are improved through the empowerment of customs. The research formulation is (1). How do Betawi Indigenous people build their people's economic system? (2). What is the shape of indigenous economic institutions in DKI Jakarta? The purpose of this research is to find out how indigenous peoples build their economic systems; to identify the form of indigenous economic institutions in Indonesia. Researchers used qualitative and quantitative descriptive methods (mix methods) with case study types. Data is collected and analyzed in observations, interviews, and documents. The results and findings are (1). the way the Betawi Indigenous people build their community's economic system by empowering indigenous peoples based on the concept that every citizen has an obligation to support their own indigenous activities. (2). The form of betawi indigenous economic institution

in DKI Jakarta that succeeds is the service cooperative "Jakarta Tenram Sejahtera (JTS)". The traditional institution or type of business in JTS Cooperative aims to provide convenience for the community to get capital in developing their own business or in selling the proceeds of the business. JTS is one of the models that can be used as an acceleration of national economic development. With this JTS Service Cooperative, betawi indigenous people experienced an increase in their economy and welfare.

Keywords: *Betawi Customs, Indigenous Based Economy, National Economy, JTS Service Cooperative*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki wilayah yang luas terdiri dari 3756 pulau terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa. Setiap suku memiliki karakter yang berbeda dengan suku lainnya, memiliki budaya dan cara bermasyarakat yang berbeda dengan wilayah lainnya. Wilayah Indonesia memiliki lembaga adat yang mengatur kehidupan sosial, budaya, maupun ekonomi. Contohnya Masyarakat adat di Bali memiliki awig-awig yang mengatur pola kehidupan sosial, budaya, agama, dan bahkan ekonomi. Secara umum, awig-awig ini dikenal dengan keputusan paruman agung. Setiap wilayah adat memiliki keputusan paruman agungnya masing-masing sesuai dengan kondisi sosial, budaya, agama, ekonomi, dan geografisnya.

Masyarakat adat di DKI Jakarta, berhasil mengembangkan konsep ekonomi adat serta modalnya melalui pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat maupun lembaga usaha atau pengusaha di setiap daerah sangat penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat adat. Keterlibatan aktif ini bisa ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam koperasi, pemberian modal, menjadi pelaku usaha, dan adanya iuran yang dibebankan kepada anggotanya. Salah satu bentuk usaha yang dikembangkan oleh masyarakat adat Jakarta adalah koperasi jasa Jakarta tenram sejahtera (JTS).

Kegiatan koperasi jasa yang dikelola oleh masyarakat adat betawi di atas yang bekerja sama dengan Forum Betawi Rempug (FBR). Usaha koperasi yang dikelola berada di sektor informal, beberapa keuntungan sektor informal menurut (Nafziger, 2012) adalah memiliki biaya yang sangat rendah, memiliki profit margin, memakai perjanjian negosiasi di luar sistem hukum, dan memberikan upah minimum. Sebaliknya menurut Bigsten A (2018: 127–148) usaha kecil di sektor informal seringkali kurang efisien dalam berinvestasi dibandingkan sektor formal. Biasanya usaha kecil kurang mampu dalam membaca peluang

pasar, kelemahan permodalan, kelemahan manajerial, termasuk kelemahan dalam memperoleh informasi akses pasar (sabin, 2016: 41–50).

Kerjasama antara masyarakat adat dengan pengusaha atau koperasi dapat menguatkan dan membangun perekonomian masyarakat di seluruh Indonesia. Indikator keberhasilan pengembangan model ekonomi ini dibuktikan dengan kegiatan usaha yang dikelola oleh masyarakat adat Betawi di provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan usaha yang sudah dilakukan masyarakat adat Betawi adalah pasar tradisional, koperasi, pengelolaan objek wisata. Pengelolaan usaha yang sudah dilakukan dapat membantu masyarakat dalam menyalurkan hasil karyanya sekalipun bersifat informal penyalurannya. Pelaksanaan usaha di Jakarta terdiri dari dua sektor yaitu sektor dan sektor informal. Sektor informal memainkan peran dalam memecahkan masalah kemiskinan (Todaro M, Smith, 2000).

Sedangkan menurut Pratap S Quintin (2009) sektor informal berkorelasi kuat dengan pembangunan ekonomi. Menurut LeRoy (2011: 127). Sektor informal sangat diminati oleh penduduk yang berprofesi sebagai pengusaha menengah kebawah karena permasalahan permodalan. *Capital* atau permodalan terdiri dari modal harta dan *Human Capital*. Human kapital di sektor informal seringkali menimbulkan *negative externalities*, sehingga pemerintah mengurangnya melalui *special taxes and regulation* [6].

Keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat adat dapat membantu percepatan pembangunan ekonomi nasional dan keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat adat di Jakarta dapat dijadikan sebagai model untuk masyarakat adat Indonesia lainnya. Model pengembangan masyarakat adat di DKI Jakarta dapat membantu masyarakat secara langsung melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya model ini, maka kemiskinan di Indonesia,

secara khusus di wilayah masyarakat adat dapat diatasi secara serius dan berkelanjutan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (1). Bagaimana cara masyarakat adat Betawi melakukan pemberdayaan masyarakat?
- (2). Bagaimana bentuk lembaga ekonomi masyarakat adat di DKI Jakarta kaitannya dengan pengembangan ekonomi?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara masyarakat adat membangun sistem perekonomiannya; mengidentifikasi bentuk lembaga ekonomi di DKI Jakarta kaitannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat sekitar.

Urgensi Penelitian

Perekonomian Indonesiabelum stabil dan masih bergantung pada negara maju apalagi pada situasi pandemi covid-19 yang sedang melanda masyarakat di seluruh dunia. Wilayah Indonesia kaya sumber daya alam, budaya, dan adat-istiadat, namun belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai solusi dalam menjaga perekonomian di era pandemi covid-19.

Masyarakat Indonesia memiliki sistem perekonomian adat yang sudah dijalankan secara turun-temurun, salah satunya masyarakat adat betawi di DKI Jakarta. Sistem perekonomian yang turun temurun itu sudah terbukti bertahan dalam berbagai kondisi dan mampu mengurangi angka kemiskinan di DKI Jakarta. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mendapatkan model pemberdayaan ekonomi masyarakat adat secara menyeluruh sebagai strategi dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Landasan Teori Masyarakat Adat

Wilayah Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, kaya akan adat istiadat yang sudah berlaku secara turun-temurun. Pola perilaku masyarakat biasanya representasi dari adat istiadat yang diberlakukan oleh sukunya masing-masing. Cara pandang masyarakat biasanya berdasarkan adat dan pandangan masyarakat sebagian besar mendambakan pekerjaan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

dan pekerja kantoran daripada memaksimalkan potensi ekonomi adatnya seperti pedagang atau pengusaha.

Prestise PNS atau pekerja kantoran dianggap lebih baik daripada pengusaha atau pedagang. Padahal secara ekonomi, seorang pengusaha atau pedagang memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS atau pekerja kantoran. Pengusaha dan pedagang memang tidak memiliki kepastian dari segi penghasilan bisa lebih besar penghasilannya disbanding pegawai namun bisa juga lebih kecil bahkan rugi.

Menurut Lambing, Et, Al (2000) Kehidupan perekonomian atau bidang usaha dalam bentuk apapun tidak terlepas dari adat-istiadat atau budaya yang dianut oleh masyarakat pada setiap daerah di Indonesia. Tingkat kewirausahaan seseorang sangat bervariasi sesuai dengan budaya atau adat-istiadat yang dianut oleh setiap masyarakat. Masyarakat betawi DKI Jakarta mengembangkan konsep ekonominya berdasarkan adat. Salah satu adat betawi berdasarkan pameo makan nggak makan asal kumpul maka kegiatan komunitas Betawi dilakukan pun secara bersama-sama dalam bentuk koperasi, lembaga usaha, dan pasar tradisional. Modal ekonomi masyarakat adat diperoleh melalui iuran dan keikutsertaan dalam mengelola usaha seperti peternakan, pertanian, perdagangan, simpan pinjam, dan sebagainya.

Pola pemahaman terhadap suatu jenis pekerjaan dipengaruhi oleh adat atau budaya masyarakat setemoat. Faktor budaya setiap masyarakat sangat mempengaruhi tingkat produktivitas. *Attitude* dan cara pandang seseorang sebagai hasil interaksi budaya. Banyak budaya yang sangat statis dan ada sedikit keinginan untuk melakukan *self improvement*, Hal itu seperti itu membuat Budaya bisa menjadi alat untuk mempercepat kemakmuran namun juga bisa menjadi faktor utama yang menghambat pengembangan kemakmuran sebuah komunitas masyarakat.

Dalam lingkungan masyarakat tropis, sikap terhadap pekerjaan pertanian adalah hal negatife, bisa juga menjadi kegiatan yang tidak dapat menguntungkan atau sia-sia. Adapun pekerjaan yang biasanya dilakukan adalah pekerjaan kantoran.

Pengusaha di Indonesia masih sangat minim struktur masyarakatnyakarena masih berpegang kepada budaya statis dan beberapa masyarakat juga masih dipengaruhi oleh setting

budaya feodalistik, sehingga sumber daya didominasi oleh tuan tanah. (Beets WC, 1990).

Dengan demikian, adat sangat berpengaruh dalam peningkatan ekonomi suatu daerah dan bahkan peningkatan pembangunan ekonomi nasional.

Pembangunan Ekonomi Nasional

Percepatan pembangunan ekonomi nasional tidak terlepas dari lembaga- lembaga ekonomi yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Konsep yang dikembangkan dalam *new institutional economics* (NIE) dengan landasan yang berusaha membangun gagasan tentang kelembagaan dan organisasi dengan tujuan untuk mencapai tingkat efisiensi serta meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Dalam konsep biaya menyeluruh, tidak hanya berupa ongkos produksi seperti konsepnya ekonomi neoklasik, tetapi juga biayatransaksi.

Keadaan pasar Indonesia yang kompetitif bisa sebagai tempat seleksi alamiah, dimana hanya perusahaan yang efisien yang dapat bertahan. Dalam konteks perekonomian masyarakat Bali menekankan pada kepastian dan keajegan. NIE di sisi lainnya beroperasi pada dua level, yaitu lingkungan makro yang disebut dengan lingkungan kelembagaan (*institutional environment*) dan lingkungan mikro yang disebut dengan kesepakatan kelembagaan (*institutional arrangement*). Lingkungan kelembagaan merupakan seperangkat struktur aturan politik, sosial dan legal yang memantapkan kegiatan produksi, pertukaran, dan distribusi. Lingkungan kebijakan ekonomi sebagai lingkungan makro meliputi: aturan mengenai tata cara pemilihan, hak kepemilikan, dan hak-hak dalam kontrak. (Budi SP, 2008: 46–60).

Dalam NIE mengeksplorasi gagasan kelembagaan non-pasar (hak kepemilikan, kontrak, partai revolusioner, dan lain-lain) sebagai jalan untuk mengkompensasi kegagalan pasar (*market failure*). Dalam pendekatan nie tersebut, kehadiran informasi yang tidak sempurna, eksternalitas produksi (*production externalities*), dan barang-barang publik (*public goods*) diidentifikasi sebagai sumber terpenting (*key sources*) terjadinya kegagalan pasar, sehingga menurut (Erani YA, 2008) meniscayakan perlunya kehadiran kelembagaan non-pasar. Sebaliknya, dalam pendekatan neo-klasik, ketiga variabel di atas diasumsikan tidak eksis, sehingga biaya-biaya transaksi (*transaction cost*) yang diasosiasikan dengan variabel tersebut dianggap tidak ada. Selain itu, literatur NIE menambahkan

beberapa poin penting tentang kegagalan kelembagaan (*institutional failures*) yang menjadi penyebab terjadinya keterbelakangan di banyak negara. Kegagalan kelembagaan tersebut merujuk kepada struktur kontrak dan hukum, serta regulasi dari penegakkan pihak ketiga (*rules of third party enforcement*) yang lemah, padahal semua itu harus diperkuat untuk dapat menjalankan transaksi pasar.

Prinsip kerja NIE beroperasi pada dua level, yakni lingkungan kelembagaan atau *institutional environment* (makro level) dan kesepakatan kelembagaan atau *institutional arrangement* (mikro level). Dalam konteks ini, usaha mikro kecil menengah (umkm) berperan memperluas lapangan pekerjaan dan berkontribusi terhadap pendapatan domestik bruto (pdp) [3]. *Institutional environment* merupakan seperangkat struktur aturan politik, sosial, dan legal yang memaparkan kegiatan produksi, pertukaran, dan distribusi. Aturan mengenai tata cara pemilihan, hak kepemilikan, dan hak-hak di dalam kontrak merupakan beberapa contoh dari lingkungan/kebijakan ekonomi. Sebaliknya, level analisis mikro berkaitan dengan masalah tata kelola kelembagaan (*institutions of governance*).

Kesepakatan kelembagaan merupakan kesepakatan antara unit ekonomi yang bertujuan untuk mengelola dan mencari jalan agar hubungan antarunit berlangsung dengan lancar, baik lewat cara kerja sama maupun kompetisi. Sebuah kesepakatan kepemilikan merupakan *institutional arrangement*, karena di dalamnya mengalokasikan hak-hak kepemilikan kepada individu, kelompok, atau pemerintah. (LeRoy Miller R, 2011:127).

Menurut Erani YA (2008) Kesepakatan kelembagaan merujuk pada cara untuk mengelola transaksi, baik melalui pasar, pasar bayangan (*quasi-market*), maupun model kontrak yang memakai hirarki. Kesepakatan kelembagaan mendekati istilah terpopuler disebut sebagai 'kelembagaan'.

Fokusnya adalah transaksi individu yang terkait dengan organisasi atau budaya masyarakat. Dalam hal ini, adanya hubungan antara budaya dengan kewirausahaan serta budaya sangat berperan terhadap perkembangan kewirausahaan. (Gamage, H.R., Et, Al, 2003).

Berdasarkan uraian di atas, maka hubungan antara budaya dengan kewirausahaan sangat mempengaruhi peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia.

Budaya memiliki peranan yang penting dalam membentuk kewirausahaan, baik budaya lokal maupun budaya nasional. Dengan demikian, lembaga-lembaga adat di seluruh wilayah Indonesia dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

METODOLOGI

Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif (*mix method*) serta tipe penelitian *grounded research* (Spradley, 2007) yang melakukan wawancara mendalam dengan teknik triangulasi kepada tokoh adat di Indonesia dan pihak perbankan. Penelitian kualitatif dan kuantitatif merupakan suatu proses pencarian data yang bertujuan untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian menyeluruh (*holistic*), dibentuk oleh kata-kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Forum Betawi Rempug (FBR) yang melahirkan koperasi jasa JTS yang ada di provinsi DKI Jakarta. Provinsi ini memiliki lembaga adat yang dapat dikelola untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya serta berdampak pada percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan studi dokumen/pustaka. Observasi dilakukan dengan cara mengamati kehidupan perekonomian masyarakat adat di koperasi jasa JTS Jakarta. Kemudian tokoh adat dan pelaku umkm diwawancarai secara mendalam yang menggunakan metode bola salju sampai pada titik jenuh penelitian terkait perekonomian masyarakat dan jenis pekerjaan serta usaha yang digelutinya selama ini. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dan disusun sesuai pola-pola yang diinginkan sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta. Pengembangan ekonomi masyarakat pada

provinsi ini sangat unik. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal (adat) seperti koperasi jasa Jakarta tentram sejahtera yang dikelola oleh anggota masyarakat atau organisasi, bidang-bidang usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan kegiatan peternakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat maupun pengembangan potensi peternakan yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Pengembangan ekonomi masyarakat pada provinsi ini dilakukan dalam bentuk koperasi jasa Jakarta Tentram Sejahtera.

Koperasi Jasa “Jakarta Tentram Sejahtera”.

Koperasi jasa “Jakarta Tentram Sejahtera” dikelola oleh kelompok masyarakat betawi yang dikenal dengan Forum Betawi Rempug (FBR). Forum Betawi Rempug (FBR) sebagai wadah organisasi kedaerahan terbesar di provinsi DKI Jakarta bahkan di Indonesia dan pembawa aspirasi kearifan local. FBR merasa perlu mengoptimalkan sisi ekonomi para anggota-anggota dalam gerakan koperasi. Pada hari senin tanggal 20 Januari 2014 telah terbentuk wadah ekonomi FBR dengan nama koperasi jasa “Jakarta tentram sejahtera” atau disingkat kopjas JTS. Dimana wadah ini akan mengatur secara profesional dan berkesinambungan dalam bidang ekonomi kerakyatan.

Kuantitas jumlah keanggotaan FBR yang merupakan potensi produktif yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi seperti bendungan air yang debit airnya tidak pernah akan habis, bila bendungan ini dipergunakan menjadi pembangkit listrik. Bukan saja yang dekat dapat bermanfaat, tapi yang jauh pun akan dapat merasakan manfaatnya pula. Berpikir kedepan akan hal tersebut pimpinan pusat Forum Betawi Rempug berinisiatif untuk segera membentuk wadah ekonomi yang berbentuk perusahaan ataupun koperasi dengan badan hukum. Bahwa koperasi yang dibentuk pada hakikatnya adalah sebuah usaha bersama yang dimiliki oleh anggota-anggota Forum Betawi Rempug dan masyarakat umum dengan keputusan tertinggi ada pada rapat anggota tahunan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota-anggotanya dengan bentuk-bentuk pelayanan yang terus dikembangkan oleh pengurus bersama anggota koperasi.



Gambar 1. Struktur Induk Organisasi Kopjas JTS
(Dokumen: Tim Peneliti, 2020)

Kopjas JTS perlu mengadakan langkah-langkah konkrit guna terwujudnya kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah yang dituangkan dalam UU No. 32/2004, maka peranan pemerintah daerah harus berperan sebagai fasilitator, katalisator, dan regulator dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk memakmurkan daerahnya. Hal ini dalam rangka membangun partisipasi masyarakat melalui proses *social* dan *economic differentiation* dengan membangun struktur ekonomi kerakyatan yang berkonsentrasi pada kebijaksanaan bidang ekonomi yang mengarah pada azas pemerataan dan keadilan berdasarkan kajian aspek potensial dan pembangunan ekonomi. Kopjas JTS memandang bahwa keberpihakan kebijaksanaan pembangunan pada pemberdayaan ekonomi rakyat yang selama ini dilaksanakan perlu terus dikembangkan dan diwujudkan.



Gambar 2. Jenis Usaha Di Koperasi Jasa “Jakarta Tenram Sejahtera” (Dokumen: Tim Peneliti, 2020)

Dengan semakin berkembangnya ekonomi global yang ditandai dengan berlakunya perjanjian perdagangan bebas regional dan internasional (AFTA, MEA, APEC, dan WTO), maka tantangan yang dihadapi gerakan koperasi semakin berat dan kompleks. Karena itu gerakan koperasi dituntut untuk mampu memantapkan identitas dan kemampuan profesionalnya dengan meningkatkan daya saing sehingga mampu menangkap peluang usaha yang semakin terbuka. Dalam menghadapi fenomenaglobal tersebut, pembinaan usaha

Gerakan koperasi diprioritaskan melalui jaringan usaha secara vertical, horizontal, dan diagonal, baik antara gerakan koperasi bumh/bumd, swasta maupun dengan lembaga lainnya, khususnya pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta. Tanpa terasa perjalanan dan eksistensi koperasi jasa “Jakarta tentram sejahtera” hampir menginjak usia 6 tahun pada tanggal 20 januari 2020, namun keberadaannya sudah banyak dirasakan oleh anggota-anggota Forum Betawi Rempug (FBR) dan masyarakat umum, khususnya para anggotakoperasi. Koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan, merasa perlu untuk ditumbuh kembangkan secara professional dengan mengutamakan kepentingan anggotanya. Sebagai target utama darpipada pencapaian tersebut, maka koperasi perlu untuk:

- 1) Menginventarisir seluruh potensi ekonomi di wilayah cakupan ditingkat RT-RW, diutamakan bidang usaha yang sudah berjalan (rintisanusaha);
- 2) Mengklasifikasikan besaran permodalan usaha dan status neraca usaha setiap tahunnya dengan memperhatikan tata kelola administrasinya;
- 3) Mengadakan pelatihan-pelatihan manajemen konvensional menjadi manajemen modern dengan tingkat kearsipan disesuaikan kemampuan pimpinan usahanya;
- 4) Melakukan hubungan kerjasama dengan instansi terkait (Koperasi&PEMDA) atau dengan organisasi LSM, profesional, swasta dan lainnya;
- 5) Memberikan laporan secara berkala kepada instansi terkait (Kemenkop Ukm, Dinas Koperasi, Dekopinwil, Induk Koperasi dan lain sebagainya).

Eksistensi koperasi jasa “Jakarta tentram sejahtera” dikelola oleh kelompok masyarakat betawi ini telah banyak memberikan lapangan pekerjaan kepada

masyarakat. Salah satu jenis usaha yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat betawi melalui koperasi ini adalah budidaya lele dan kuliner.



Gambar 3. Budidaya Lele Dan Kuliner di "Jakarta Tentram Sejahtera" (Dokumen: Tim Peneliti, 2020)

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan koperasi ini, antara lain:

- 1) Pembuatan kaos, mug, pin untuk caleg partai politik dandpd.
- 2) Pembuatan kaos untuk pasangancapres.
- 3) Pembuatan mug untuk kegiatan NGOinternational.
- 4) Kerjasama pengadaan seminar tentang peluang usaha di Jakarta dengan segmen para pedagang kecil/warungseederhana.
- 5) Pembuatan kaos untuk acara 17 agustusan kelurahanpaseban.
- 6) Selalu ikut menjadi peserta dan panitia di salah satu stand di PRJ kampungbetawi.
- 7) Menciptakan brand produk merchandise dengan namabandar pantun.
- 8) Kerjasama promosi produk-produk koperasi dengan tabloid suara kerempugan.
- 9) Menjadi bapak angkat bagi para pedagang di sekitar ukm ikan hias joharbaru, pedagang di Masjid Akbar Kemayoran, pedagang di Kelurahan Paseban.
- 10) Turut serta dalam promosi produk-produk koperasi di lebaran betawi yang diadakan oleh bamus betawi setiaptahun.
- 11) Pelatihan di KEMENKOP UKM untuk anggota-anggota koperasi yang baru mulai menjadi wirausaha baru/pemula.
- 12) Kerjasama dengan Universitas Borobudur Jakarta dalam hal inkubator bisnis.
- 13) Kerjasama dengan CV. Bintang express dalam hal ekspedisi pengiriman barang ke berbagai daerah disumatera.

- 14) Pengadaan gula konsumsi untuk UMKM dan home industri, kerjasama dengan distributor gula GMP.
- 15) Kerjasama dengan Koperasi Griya Agung wirausaha nusantara dalam hal pengadaan sembako dan kebutuhan pangan.
- 16) Pengadaan panggung hiburan untuk seniman music di pusat wisata kuliner JTS kemayoran.
- 17) Membentuk panggung kesenian dan komunitas budaya nusantara.
- 18) Pelatihan dan pendidikan bagi wirausaha pemula pedagang binaan koperasi kerjasama dengan kementerian koperasi dan ukmri.
- 19) Menjadi rekanan perum bulog di provinsi DKI Jakarta dan Banten dalam distribusi gula konsumsi bagi warga DKI Jakarta.

Semua kerja sama di atas dibangun untuk meningkatkan perekonomian masyarakat betawi. Masyarakat betawi tetap berjuang kendati mereka hidup di tanahnya sendiri dan berada di kota Jakarta. Dengan adanya koperasi ini maka menjadi salah satu solusi dalam memberikan lapangan pekerjaan kepada anggota masyarakat betawi maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.

KESIMPULAN

Dari penjelasan bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikutcara masyarakat adat membangun sistem perekonomian masyarakat Jakarta sangat unik. untuk kasus adat betawi di Jakarta mereka membangun dari Forum Betawi Rempug (FBR) yang sudah disahkan dengan mentoring dan memberikan pelatihan kepada masyarakat (usaha kecil menengah). sehingga muncul istilah kewirausahaan sosial dimana koperasi jasa JTS memberikan sistem bagi hasil kepada UMKM, begitu juga dengan koperasi dimana warga bisa menggunakan tempat milik koperasi jasa tanpa membayar dan membagi hasil penjualan umkm kepada koperasi jasa tersebut.

Bentuk lembaga ekonomi masyarakat di daerah DKI Jakarta juga menarik sekali. di Jakarta dengan Forum Betawi Rempug (FBR) membangun sistem Koperasi Jasa Jakarta Tentram Sejahtera (JTS). JTSmerupakan salah satu model yang bisa digunakan sebagai percepatan pembangunan ekonomi nasional. dengan adanya koperasi jasa JTS ini maka

masyarakat adat Betawi mengalami peningkatan ekonomi dan kesejahteraan hidupnya.

SARAN

Ada beberapa bagian yang belum diteliti di Koperasi JTS, karena keterbatasan waktu dan tenaga. Oleh karena itu agar penelitian dilanjutkan oleh peneliti lain, dengan melihat bentuk Model Pemberdayaan ekonomi masyarakat di luar Forum Betawi Rempug, misalnya FPI (Front Pembela Islam), Forum Srikandi dan Komunitas yang lain yang ada di Jakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Ristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah memberikan bantuan dana untuk penelitian terapan kami. Hibah yang dimaksud penulis adalah penelitian Skema Penelitian Terapan Mulai Tahun 2019 Sampai Sekarang. Kami berharap juga dapat diberikan danakembali di tahun 2021 yang akan datang. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Dhyana Pura yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menggunakan fasilitas kampus.

DAFTAR PUSTAKA

Beets WC. *Raising and Sustaining Productivity of Smallholder Farming Systems in the Tropics*. Holland: AgBe Publishing, 1990.

Bigsten A. (2018). Determinants of the evolution of inequality in Africa. *J Afr Econ*; 27.

Budi SP. (2008) Relevansi Dan Aplikasi Aliran Ekonomi Kelembagaan. *J Ekon Pembang*: 9

Erani YA. *Ekonomi Kelembagaan*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Gamage, H.R. Cameron, D. & Woods E. Are Sri Lankan Entrepreneurs Motivated by the Need for Achievement? In: *Presented at the 9th International Conference on Sri Lanka Studies, 28th – 30th November 2003*. Sri Lanka: Matara, 2003.

Lambing P dan CRK. *Entrepreneurship*. New Jersey, USA: Prentice Hall, 2000.

LeRoy Miller R. (2011). *Business Law Today: The Essentials*. In: *South-Western Cengage Learning*.

Nafziger EW. (2012) *Economic Development*. 2012. Epub ahead of print. DOI:10.1017/CBO9781139028295.

Pratap S, Quintin E. (2009). The Informal Sector in Developing Countries: Output, Assets, and Employment. In: *Personal Wealth from a Global Perspective*. Epub ahead of print 2009. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199548880.003.0018.

Sabirin. (2016) UMKM, MEA, Pembangunan Ekonomi. *J Kewirausahaan dan Usaha Kecil Menengah*; 1.sa

Todaro M., Smith S. (2012). *Economic Development*. Epub ahead of print 2012. DOI:10.1177/089124240001400105.

Saffu K. (2009). The Role and Impact of Culture on South Pacific Island Entrepreneurs, *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*.

Spradley, James P. (2007). *Metode Etnografi*. Yogyakarta : Tiara Wacana